

## **Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kinerja Pemerintah**

*M. Faizin Ardiansyah<sup>1</sup>, Umaimah<sup>2</sup>*

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Gresik, Jalan Sumatera 101, Komplek GKB, Gresik, 61121, Jawa Timur, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Gresik, Jalan Sumatera 101, Komplek GKB, Gresik, 61121, Jawa Timur, Indonesia

---

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to examine the effect of accountability and transparency on government performance. The grand theory in this study is the theory of stewardship which explains the existence of local government as one of the institutions that can be trusted in acting in accordance with its duties and functions that prioritize and prioritize the public interest, provide financial responsibility, so that economic goals, public services and public welfare can be achieved. This study tested the hypothesis by taking samples from Roomo village government employees and Sukamulyo village government employees. The results of the hypothesis test obtained empirical findings that accountability and transparency affect the performance of village government.*

*Keywords: Government accounting, government performance*

## 1. Pendahuluan

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini banyak memberikan manfaat bagi desa yang ada di seluruh Indonesia. Dalam pembahasannya undang-undang ini membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 7 (tujuh) tahun, dimana undang-undang ini mengatur sumber pendanaan sekitar 73 ribu desa yang ada di Indonesia berasal dari pemerintah pusat dan kas daerah. Dalam undang-undang yang sudah disahkan tersebut, dimana setiap desa mendapatkan alokasi dana mencapai satu miliar rupiah tiap desanya. Dengan adanya undang-undang tentang desa ini, maka setiap desa mendapat jaminan yang pasti dalam hal pendanaan bagi desa dari pemerintah dengan melalui anggaran negara dan anggaran daerah yang memiliki jumlah berkali lipat dari jumlah anggaran sebelum adanya undang-undang ini.

Salah satu faktor keberhasilan dalam pengelolaan dana desa untuk terselenggaranya fungsi pemerintahan desa seperti yang disebutkan dalam peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tersebut dipengaruhi oleh kinerja aparat desa atau pegawai desanya. Aryani (2020) menyatakan bahwa

kinerja kepala desa sangat memiliki pengaruh yang signifikan dalam peningkatan pengelolaan dana desa dan peningkatan ketercapaiannya program desa di pemerintahan desa Kabupaten Buleleng. Sehingga kinerja pemerintahan desa sangat perlu diperhatikan untuk dapat mengoptimalkan terselenggaranya fungsi desa demi kepentingan masyarakat desa.

Desa Roomo dan desa Sukomulyo Kabupaten Gresik, Jawa Timur, merupakan dua desa diantara 330 desa yang terdapat di kabupaten Gresik yang menerima dana desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dari pemerintah pusat melalui anggaran negara dan anggaran daerah. Namun sayangnya, desa ini belum mampu melakukan pengelolaan keuangan dengan baik di kedua desa tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh pemerintah desa dinas pemberdayaan masyarakat dan desa yang tertuang dalam laporan akuntabilitas kinerja kabupaten gresik tahun 2021 menyatakan bahwa terdapat permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Roomo Kecamatan Manyar dan ditindaklanjuti dengan Musyawarah penyempurnaan APBDesa Desa Roomo Kecamatan Manyar yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Gresik.

Agustiana (2020) menyatakan

bahwa tingkat efisiensi dari penggunaan dana-desa sebesar 99% di Desa Sukomulyo pada tahun 2016 – 2019 mempunyai kriteria kurang efisien, di tahun 2016 memiliki prosentase sebesar 100% pengelolaan dana desa ini masih tidak efisien, hal ini disebabkan karena dalam pengelolaannya kegiatan yang melibatkan kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang sumber dananya berasal dari dana desa masih belum mencukupi, dan dilihat dari kondisi desa yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan keadaan desa yang masih bisa dikatakan tertinggal. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan kinerja pemerintahan desa di desa Roomo dan desa Sukomulyo Kabupaten Gresik, Jawa Timur masih kurang memadai, terutama dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan penelitian dari Wardana (2016) menyatakan bahwa, factor-faktor yang dapat memengaruhi kinerja pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan keuangan desa yaitu berdasarkan kata akuntabilitas dan transparansi.

Mustofa (2012) dalam Wardana (2016) mengatakan bahwa akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban yang harus dilakukan suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkandalam hal keberhasilan atau kegagalan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan

pada sebuah periode sebelumnya secara rutin setiap saat. Selain akuntabilitas, untuk menilai kinerja suatu pemerintahan desa terutama dalam hal pengelolaan dana desa juga dilihat dari transparansinya kepada kepada pusat, dan masyarakat luas dalam pengelolaan dana desa. Tranparansi adalah sebuah prinsip keterbukaan dimana setiap masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan sebuah akses yang seluas-luasnya informasi tentang keuangan daerah (Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah). Transparansi adalah sebuah hal yang sangat penting dalam menjalankan mandate dari rakyat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan. Pada saat ini pemerintah memiliki suatu kewenangan untuk mengambil keputusan yang sangat penting bagi masyarakat, maka untuk mewujudkan hal ini pemerintah mau tidak mau harus menyediakan informasi yang lengkap dan memadai tentang hal apa saja yang sedang dikerjakannya. Maka dalam hal ini transparansi menjadi sebuah alat yang sangat penting dalam menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan-perbuatan yang melanggar seperti korupsi.

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap kinerja

pemerintah desa. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah desa, karena dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan adanya perbedaan hasil penelitiannya (riset gap). Riset gap adalah senjang atau celah-celah dalam penelitian yang dimasuki oleh peneliti melalui pengalaman ataupun temuan yang didapatkan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Sampel penelitian yang digunakan pada beberapa penelitian sebelumnya adalah perangkat desa roomo dan desa sukumulyo, manyar Gresik memiliki perbedaan. Dalam penelitian ini mencoba melanjutkan dari penelitian-penelitian sebelumnya agar terdapat konsistensi dan apakah hasil dari penelitian ini memiliki pengaruh atau tidak.

## **2. Litratore riview dan pengembangan hipotesis**

Teori stewardship bisa diterapkan pada studi akuntansi terutama untuk organisasi sector public, salah satunya adalah organisasi pemerintahan. Teori ini sejak awal perkembangannya akuntansi sector publik dipersiapkan dalam hal memenuhi kebutuhan informasi sector public untuk hubungan antar manajer-manajer. (Yusof, 2016) mengatakan bahwa pemerintah yang memiliki fungsi sebagai pengelola baik itu dalam hal

mengelola sumber daya dan masyarakat sebagai pemilik utama sumber daya tersebut. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pemerintah yang bisa dikatakan sebagai manajer dan masyarakat (rakyat) yang disebut sebagai berdasarkan kepercayaan antara keduanya dan Bersama-sama mengikuti tujuan organisasi. Organisasi sector publik yang memiliki fungsi memberikan sebuah pelayanan kepada publik dan juga memiliki tanggung jawab kepada publik pula.

Implikasi dari teori stewardship pada penelitian ini adalah mampu menjelaskan bahwa adanya keberadaan dari pemerintah daerah ini mnejadi suatu Lembaga yang bisa dipercaya agar bertindak sesuai dengan kepentingan umum dengan menjelaskan tugas dan fungsi dari Lembaga pemerintahan daerah dengan sebaik-baiknya, mempertanggungjawabkan keuangan, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan public masyarakat dan kesejahteraan masyarakatnya dapat tercapai (Tri Sintya Yolanda 2020). Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, regulator (pemerintah) mengerahkan seluruh kemampuan dan keahliannya untuk melakukan pengendalian internal sehingga mampu menghasilkan sebuah laporan informasi keuangan yang berkualitas. Informasi keuangan ini

didapatkan dengan cara mengumpulkan kinerja keuangan dari jumlah anggaran yang dimiliki pemerintah yang sudah berjalan. Apabila dalam hal ini pemerintah mampu mewujudkan tujuan yang sudah ada, maka masyarakat yang dalam hal ini sebagai pemilik akan merasa puas dengan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah

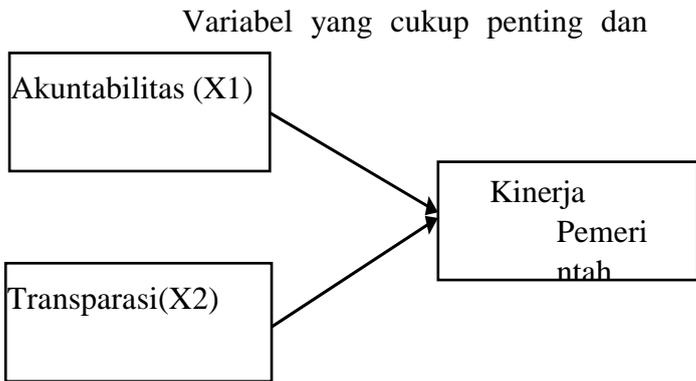
## **2.1 Pengembangan Hipotesis**

Salah satu ciri dari akuntabilitas yang diungkapkan oleh Sulistoni (2003) adalah adanya sebuah ruang bagi masyarakat yang ikut terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan itu sendiri. Sedangkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dapat dikatakan transparan menurut Sopamah dan Mardiasmo (2003) jika anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tersebut sudah memenuhi dan telah terakomodasinya suara (usulan) dari masyarakat itu sendiri. Hal lainnya yang perlu agar pemerintah dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan tidak menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku maka diperlukan pengawasan terhadap APBD tersebut.

Ciri dari sebuah akuntabilitas adalah dengan adanya ruang yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat ikut

terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Anggaran yang dimiliki oleh pemerintah harus transparan dalam pelaksanaannya, hal ini agar pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemerintah harus melibatkan dan mengakomodasi suara dan usulan yang ada dimasyarakat. Bagian yang membahas hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan adalah pendekatan yang dilakukan secara umum dapat meningkatkan mutu kerja dari anggaran adalah salah satu dari bagian akuntansi keprilakuan (Rifkayanti Amrulah 2019).

Transparansi dapat diartikan sebagai sebuah keterbukaan (openness) atas aktivitas yang dilakukan dalam pengelolaan sebuah sumber daya public yang sedang dilakukan oleh pemerintah, Dwi Indarwati Armaningsih (2020). Sehingga transparansi dalam menyelenggaraan kebijakan serta pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa menjadi sangat penting dalam menumbuhkan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Semakin baik sebuah transparansi pemerintah desa maka akan semakin baik juga kinerja pemerintah desa.



dapat menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran, maka pemerintah perlu membuat kebijakan dalam melakukan penyusunan anggarannya. (Fernandes 2015; Julia Praba 2019) mengatakan bahwa dengan semakin transparannya sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu, maka akses informasinya juga harus dengan mudah untuk diketahui oleh publik. Berdasarkan riset empiris yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja (Aang 2018; Anugriani 2014; Oktavia 2020). Transparansi didalam melakukan penyusunan sebuah anggaran dapat meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Sehingga memperlihatkan kinerja pemerintah desa yang jujur dan bertanggung jawab. Dengan demikian akan mampu memberikan rasa percaya kepada masyarakat dan atasan untuk memperoleh dukungan dalam pengelolaan dana desa (Alfi 2019; Wahyu 2018; Wicaksono 2018; Zulfadzal 2020)

**H1: terdapat pengaruh yang signifikan positif antara akuntabilitas dana desa terhadap kinerja**

**H2: terdapat pengaruh yang signifikan positif antara transparansi dana desa terhadap kinerja pemerintah.**

### 2.3 Kerangka Konseptual

**Gambar 1  
Kerangka  
Konseptual**

### 3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis deskriptif dan dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian jenis deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka dan dilakukan untuk menguji hipotesis yang kemudian hasilnya yang didapatkan dan diseskripsikan dalam bentuk kalimat deskripsi. Populasi dan Sampel Penelitian ini pegawai pemerintahan desa Roomo dan pegawai pemerintahan desa Sukamulyo.

#### 3.1 Variabel Operasionalisasi dan Pengukuran

##### a. Variabel independen penelitian:

Akuntabilitas ( $X_1$ ) diukur dengan 5 indikator, yaitu alat pertanggung jawaban, pencatatan laporan keuangan, Penyajian laporan keuangan, jujur dan adil.

Transparansi sebagai variabel independen kedua ( $X_2$ ) diukur dengan 5 indikator yaitu mekanisme sistem keterbukaan dan standarisasi,

penyediaan akses informasi, mekanisme yang memfasilitasi

| Variabel           | Koefisien | Sig . | t hitung | Hasil       |
|--------------------|-----------|-------|----------|-------------|
| Akuntabilitas (X1) | 0,255     | 0,027 | 2,275    | H1 Diterima |
| Transparansi (X2)  | 0,235     | 0,040 | 2,106    | H2 Diterima |

pelayanan publik, mekanisme pelaporan dan penyebaran informasi dan Amanah dan kejujuran.

#### b. Variabel dependent dalam penelitian ini:

Varibael dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Pemerintah (Y) diukur dengan 5 indikator, yaitu Produktivitas, orientasi kualitas layanan kepada masyarakat, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

### 4. Hasil Penelitian & Interpretasi

#### 4.1 Hasil uji hipotesis

Untuk menguji hipotesis yang ada dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan uji untuk mengetahui apakah variabel bebas yang ada dalam penelitian ini apakah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya. Uji parsial yang dilakukan pada penelitian ini

digunakan dalam hal menganalisa pengaruh langsung dari variabel akuntabilitas (X<sub>1</sub>) dan transparansi (X<sub>2</sub>) terhadap kinerja pemerintah daerah (Y). Uji parsial ini juga berguna untuk mengetahui apakah variabel independent dalam penelitian ini apakah kedua variabel

independennya memiliki pengaruh yang signifikan sehingga perlu dilakukan uji hipotesis parsial. Berikut hasil uji hipotesis secara parsial:

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Sumber : Data hasil uji SPSS diolah  
 Variabel dependen: Kinerja Pemerintah DesaTingkat  
 signifikansi: 1%\*\*\*, 5%\*\* , 10%\*

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresinya adalah:

$$Y = a + 0,255 \text{ Akuntabilitas} + 0,235 \text{ Transparansi} + e$$

Berdasarkan tabel hasil uji hipotesis secara parsial diperoleh hasil bahwa variabel X<sub>1</sub> yang diwakili oleh akuntabilitas dan variabel X<sub>2</sub> yang diwakili oleh transparansi memiliki pengaruh terhadap variabel Y yang diwakili oleh kinerja pemerintah daerah. Indikasi ini dapat dilihat dengan merujuk pada nilai signifikansi (p<sub>value</sub>) yang menunjukkan angka yang didapatkan dari hasil penghitungan yang dilakukan menunjukkan nilai sebesar 0,027 dan 0,040, hal ini memiliki arti bahwa hasil penghitungan lebih kecil dari nilai signifikansi yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 0,05 (5%).

Selanjutnya, apakah variabel independen yang ada dalam penelitian yang diwakili oleh akuntabilitas (X<sub>1</sub>) dan transparansi (X<sub>2</sub>) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dalam penelitian yaitu

kinerja pemerintah desa (Y) maka dilakukan uji t. hasil penghitungan dari uji t yang biasa disebut dengan  $t_{hitung}$  ini akan dibandingkan dengan hasil dari  $t_{tabel}$  hasil penghitungan yang ditunjukkan pada tabel diatas.

Dari hasil penghitungan diatas, yang dapat dilihat pada tabel, maka hasil pengujian yang sudah dilakukan pada hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang berbunyi bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa, dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa  $t_{hitung}$  sebesar 2,275 hal ini menunjukkan bahwa lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 2,002. Maka hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa  $H_0$  dalam penelitian ditolak dan  $H_a$  diterima, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh anatara akuntabilitas dengan kinerja pemerintah daerah.

Hasil uji yang dilakukan terhadap hipotesis penelitian yang kedua ( $H_2$ ) yang berbunyi Transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, dari hasil uji yang sudah dilakukan dan dapat dilihat pada tabel diatas didapatkan bahwa  $t_{hitung}$  sebesar 2,106, sedangkan  $t_{tabel}$  nya sebesar 2,002, hal ini menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  dan dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  dalam penelitian ini ditolak dan  $H_a$  diterima, hal ini dapat diartikan bahwa secara parsial ada pengaruh anatara transparansi dengan kinerja pemerintah daerah.

## 4.7 Pembahasan

### 4.7.1 Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah

Hasil uji hipotesis pertama memperoleh hasil bahwa akuntabilitas dapat menjelaskan kinerja pemerintahan. Indikasi yang dapat dilihat dari hasil ini adalah akuntabilitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Artinya, untuk memastikan masyarakat mau mengelola dana desa, pemerintah desa harus memperhatikan latar belakang pendidikan, pengalaman pendidikan, pemahaman tentang pertanggungjawaban dana desa, serta aturan dan tata cara pengelolaan desa.

Implikasi dari teori stewardship dalam penelitian ini adalah bahwa pemerintah desa bertanggung jawab secara keuangan dan oleh karena itu mengambil tujuan ekonomi dalam memberikan pelayanan publik dan bertindak untuk kepentingan publik dengan menjalankan kewajiban, kewajiban dan fungsinya dengan baik. sebagai lembaga yang kredibel dan mencapai kemaslahatan bersama (Tri Sintya Yolanda2020). Akuntabilitas desa sangat penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Karena akuntabilitas masyarakat, mereka mengetahui kegiatan anggaran, sehingga

pemerintah desa akan berusaha untuk berhasil mengimplementasikan semua rencana yang ada dan akan dipantau oleh masyarakat. Dari hasil penghitungan yang sudah dilakukan, maka hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang sudah lebih dulu dilakukan oleh Dewi & Gayatri (2019) yang menyebutkan hal ini berdampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan kas desa.

#### **4.7.2 Pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah**

Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan indikasi bahwa transparansi dapat menjelaskan kinerja pemerintah desa. Indikasi yang dapat dilihat dari hasil ini adalah transparansi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa. Artinya, bahwa pemerintah harus menerapkan kebijakan untuk memberikan informasi secara terbuka yang memiliki kaitannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya publik yang sedang dikelolanya terhadap pihak-pihak yang memerlukannya. Jika lembaga menerapkan transparansi, itu akan dilakukan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab mereka.

(Lestiawan dan Jatmiko, 2016) mengatakan bahwa transparansi pemerintah akan meningkatkan kinerja pemerintah untuk melaksanakan program pemerintah dan bekerja dengan baik

dalam pengambilan sebuah keputusan publik yang dikelolanya. Adanya keterbukaan dari pemerintah dalam hal pengelolaan kegiatan public yang dikelola pemerintah ini akan semakin mudah dalam hal melakukan pengawasan (Andreana dan Wirajaya, 2018). Sesuai teori utamayang ada dalam penelitian ini, yaitu teori stewardship, bahwa dengan semakin jelasnya sebuah informasi yang diterima oleh public dari pemerintah daerah, maka dalam hal ini juga akan semakin meningkatkan kepercayaan dari masyarakatnya. Dalam hal pengawasan yang akan dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah, yang dapat mencegah dari penyalahgunaan pengelolaan sumber daya dan pelanggaran seperti korupsi dan pelanggaran lainnya.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menyempurnakan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Auditya dan Lismawati (2013), Lestiawan dan Jatmiko (2016) dan Pratolo (2010) yang menemukan bahwa penerapan aspek transparansi logis ketika informasi hukum publik ditransmisikan secara transparan oleh pemerintah hal ini mengarah pada semakin baiknya tingkat dari kepercayaan masyarakat (publik) kepada pemerintah juga semakin baik dalam hal mencapai kinerja dari pemerintah. Sebaliknya, menurut penelitian yang dilakukan oleh

Intihanah dan Muthia (2016), menyebutkan bahwa partisipasi dalam sebuah anggaran akan mempengaruhi dari kinerja dari instansi pemerintahan.

## 5. Simpulan

Dari uraian pada pembahasan diatas, maka didapatkan beberapa kesimpulan yaitu secara parsial menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan. Intensitas dari pengaruh yang didapatkan berdasarkan hasil uji yang sudah dilakukan maka didapatkan bahwa koefisien determinasi pada variabel independent mampu menjelaskan sebesar 12% variabel kinerja pemerintah mempengaruhi dan sisanya sebesar 88% dipengaruhi oleh factor lainnya yang tidak dilakukan pada penelitian ini.

Rekomendasi yang dapat diberikan kepada pemerintah desa adalah dalam hal perbaikan sistem pelayanan publik dan memperkuat pendekatan dengan masyarakat. Perbaikan sistem pelayanan publik ditujukan agar selalu dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat baik dalam kebutuhan layanan publik maupun informasi terkait pengelolaan pemerintah desa. Kemudian Saran bagi penelitian selanjutnya dengan berdasarkan konsep dan hasil dari

penelitian ini adalah penelitian selanjutnya dapat menguji model determinan kinerja pemerintah yang berbeda, misalnya dengan menggunakan variabel lain seperti corporate govermen atau sistem pelayanan pemerintah.

Keterbatasan Penelitian ini hanya memperoleh sedikit responden atas survey yangtelah dilakukan. Hal ini dapat dimungkinkan karena atmosfer akademik dan kesadaran masyarakat atas pentingnya penelitian yang tergolong rendah. Penelitian ini belum menguji dimensi kinerja pemerintah yang lainnya seperti kinerja keuangan ataupun sistem pelayan

## Daftar Pustaka

- Amrulah, Rifkayanti. 2019. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa-Desa Di Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah). Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo
- Armaningsih, Dwi Indarwati dan Handayani Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Surabaya: STIESIA Surabaya
- Dewi, Ni Komang Ayu Julia Praba. 2019. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ejournal

- Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 26 No. 2. Hal. 1269-1298
- Dwiyanto, Agus, 2006, Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public. Yogyakarta: UGM Press.
- Halim, Abdul dan Abdullah, Syukriy. 2006. Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran Dan Akuntansi. 2006. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Vol. 2. No. 51. Hal. 53-64
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Kusnendar, Aang. 2018. Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. Ciamis; Universitas Galuh Ciamis
- Nachrowi. 2006. Ekonometrika Analisis Ekonomi dan Keuangan. Cetakan Pertama. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Oktavia, Norni. 2020. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Skripsi. Bengkulu: IAIN Bengkulu
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sukmawati, Fitri dan Nurfitriani, Alfi. 2019. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut). Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM. Vol. 2 No. 1. 52-66
- Paramitha, Linda Muchacha 2014 dkk. Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Rangka Otonomi Desa (Studi Di Desa Gulun, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan). Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. I No. 4. Hal. 91-100
- Purti, Reski Amalia. Pengaruh Transparansi Dan Pengawasan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Pada Desa Paomacang). Jurnal. Palopo: Univesitas Muhammadiyah Palopo
- Ramadona, A. 2016. "Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Struktur Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Konservatisme Akuntansi". Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Vol. 3, No. 1.
- Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara
- Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara
- Syaprayitno dan Prihatin, Panca Setyo. 2016. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membantu Kepala Desa Menyusun Rencana Pembangunan Desa. Jurnal Pemerintahan, Politik, dan Birokrasi. Vol. II No. 1. Hal. 59-70
- Ultafiah, Weny. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten

- Lahat. Skripsi. Palembang : Universitas Muhammadiyah Palembang  
Bandung: Agung Media
- Wahyu. 2018. Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Skripsi. Makasar : Universitas Muhammadiyah Makasar
- Wicaksono, Galih. 2018. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana Terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Mertoyudan). Skripsi. Magelang : Universitas Muhammadiyah Magelang
- Umi Narimawati. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi.
- Yolanda, Tris Sintia. 2020. Analisis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terhadap Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Ldesa Medan Krio Kecesunggal). Skripsi. Medan : Universitas Pembangunan Panca Budi
- Zulfadzal. 2020. Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Di Gampong Lampeudeu Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie). Skripsi. Banda Aceh : UIN Ar-R

